

**HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI DENGAN  
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PERKOTAAN**  
**(Studi Pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten  
Bandung Barat)**

*Suryana dan Heraclitos Rendeo*

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: [suryana\\_kopo@gmail.com](mailto:suryana_kopo@gmail.com) / [rendeohaerclitos@yahoo.com](mailto:rendeohaerclitos@yahoo.com)

**Abstrak**

*(Penelitian ini mengambil judul Implementasi Kebijakan dan Koordinasi sebagai Determinan dalam Mencapai Efektivitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Adakah pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan; 2) Adakah pengaruh koordinasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan dan 3) Adakah pengaruh implementasi kebijakan dan koordinasi secara simultan terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan di Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.*

*Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel Sample sensus, ukuran responden 40, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan penyebaran angket. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Adapun variabel bebas yaitu Implementasi Kebijakan dan Koordinasi sedangkan variabel terikatnya adalah Efektivitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan uji t dan untuk mengetahui signifikan tidaknya digunakan uji F (Anova), sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan uji anova.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan P2KP sebesar 0.393 atau 39,30 % dan Koordinasi memberikan kontribusi sebesar 0,563 atau 56,300%. Sedangkan pengaruh secara simultan Implementasi*

*Kebijakan dan Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,835 atau 83,50% sedangkan sisanya sebesar 14,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Saran yang dikemukakan diantaranya adalah : 1) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran melalui APBD pada setiap tahun secara berkelanjutan, 2) Kebijakan P2KP perlu dilanjutkan dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan dan menstranformasikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang hidup dan berkembang sebagai bingkai dan spirit gotong royog dalam membangun daerah.*

*Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Koordinasi dan Efektivitas*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pergantian kepemimpinan Nasional, maka lahirlah orde Reformasi, berusaha untuk membangun kembali sendi-sendi kehidupan yang rusak, maka dibuatlah Program-program Penanggulangan Kemiskinan dari mulai PNPM, P2K, dan saat ini berdasarkan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan

kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari atas dan dari bawah.

Pelaksanaan berbagai program yang dilaksanakan oleh organisasi, perlunya memperhatikan efektifitas pelaksanaannya termasuk pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Pada tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kecamatan

sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan sela-ras waktu (*synchrone*). Dengan demikian Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan forum LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program
2. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan

3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pemba-ngunan partisipatif
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis, melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan berkelanjutan.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dalam Tahun Anggaran 2015 melaksanakan Program kerja sesuai dengan program pe-merintah Pusat dan Kabupaten Bandung Barat, salah satunya adalah Program Penanggulangan Kesmiskinan Perkotaan (P2KP) yang didasarkan pada Peratur-an Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemis-kinan Perkotaan. Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk mendorong pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu Kabupaten Bandung Barat Cermat

Koordinasi merupakan salah satu alat untuk mencapai kerjasama yang baik diantara pegawai dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Koordinasi juga sangat diperlukan untuk melaksanakan perintah, instruksi, pelaksanaan pekerjaan, serta pengambilan keputusan penyampaian kebijakan dan kegiatan organisasi lainnya secara efektif.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul : Implementasi Kebijakan dan Koordinasi sebagai determinan dalam mencapai efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

(P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian yang dijadikan pernyataan masalah (*problem statemen*), yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat belum efektif yang diakibatkan oleh belum berjalannya implementasi kebijakan dan koordinasi dengan optimal, sedangkan yang menjadi pertanyaan masalah atau *problem quention* dalam penelitian ini Adakah pengaruh Implementasi Kebijakan dan Koordinasi terhadap Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Masalah tersebut selanjutnya diidentifikasi sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di bidang Prasarana Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Koordinasi terhadap efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
3. Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan dan

Koordinasi secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di bidang Prasarana Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencapai jawaban yang dapat menjelaskan pengaruh implementasi kebijakan dan koordinasi yang dilakukan sebagai determinan dalam mencapai efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di bidang Prasarana Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis secara lengkap dan jelas mengenai implementasi kebijakan dan koordinasi sebagai determinan dalam mencapai

efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

2. Mengembangkan konsep tentang implementasi kebijakan dan koordinasi dalam upaya dalam mencapai efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
3. Menerapkan secara teoritis konsep implementasi kebijakan dan koordinasi dalam rangka memecahkan masalah dalam upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001:68), mendefinisikan :  
“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.”

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi secara sederhana diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Diana dan Tjipto (2003:7)

mengemukakan bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group)”.

Berdasarkan uraian para ahli tentang pengertian implementasi, dapat dijelaskan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta menerima segala berbagai akibat/dampak setelah kebijakan tersebut dilaksanakan tersebut.

## B. Pengertian Koordinasi

Pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien apabila fungsi-



sungsi dari masing-masing sub bagian organisasi dapat terkoordinasi dengan baik. Hal ini mengandung arti bahwa koordinasi merupakan suatu aktivitas mengintegrasikan atau menyatupadukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sub-sub bagian dalam suatu organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Handoko (2003:195), “Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif”. Handayani (2002:54),

menyatakan “Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri”.

Setiap unit walaupun mempunyai tugas dan sasarannya sendiri, namun tiap unit tidak dapat melepaskan diri dari unit lainnya. Demikian halnya karena (1) suatu unit terdiri dari unit lainnya. Berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh unit lain, (2) setiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya bila seluruh organisasi ingin bergerak dengan lancar dan efektif melaksanakan tugasnya mencapai tujuan.

Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para pegawai, sebab tanpa koordinasi setiap pegawai tidak mempunyai pegangan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.

Handoko (2003:195), mendefinisikan koordinasi sebagai berikut :

”koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan

mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan”

Dalam perkembangan saat ini, dimana organisasi dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan harapan para pelanggannya menyebabkan saling ketergantungan antar unit dalam satu organisasi sangat tinggi diperlukan koordinasi. Thompson dalam Handoko (2003:196), menyebutkan ada tiga macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi, yaitu :

”1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling

tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan memuaskan untuk suatu hasil akhir.

2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana satu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja.

3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*),

merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.”

Mooney dan Reily dalam Handayani (2002:75), mendefinisikan ”koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam pencapaian tujuan bersama”. Sedangkan Mc. Farland dalam Handayani (2002:75), mendefinisikan ”koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama”.

Sedangkan Handoko (2003:199), menyebutkan mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah

komponen-komponen vital manajemen sebagai berikut :

- ”1. Hirarki manajerial, yaitu perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang berupa keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dengan pengasawan rutin.
3. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan

tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan satuan-satuan organisasi”.

Berdasarkan pendapat para ahli sebagai telah disebutkan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

- a. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-

orang yang punya kebutuhan dan keinginan berbeda.

b. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.

c. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

d. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.

### C. Konsep Efektivitas

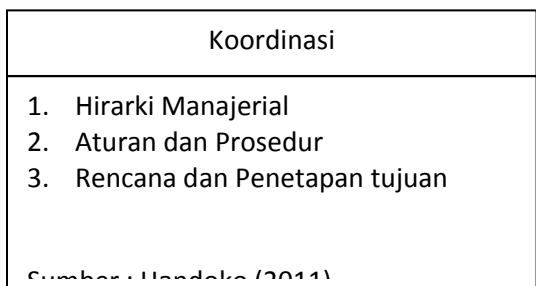
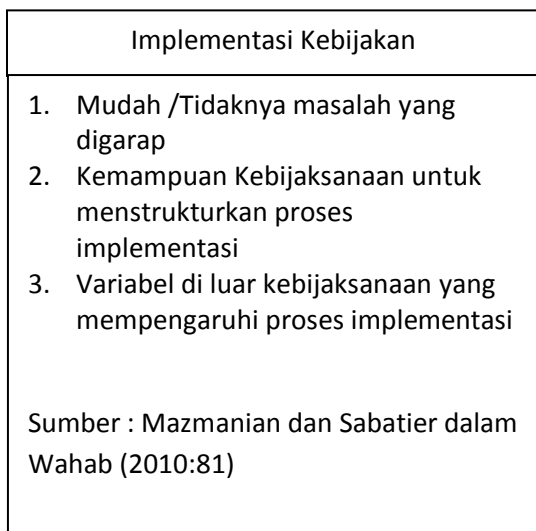
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang

berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu.

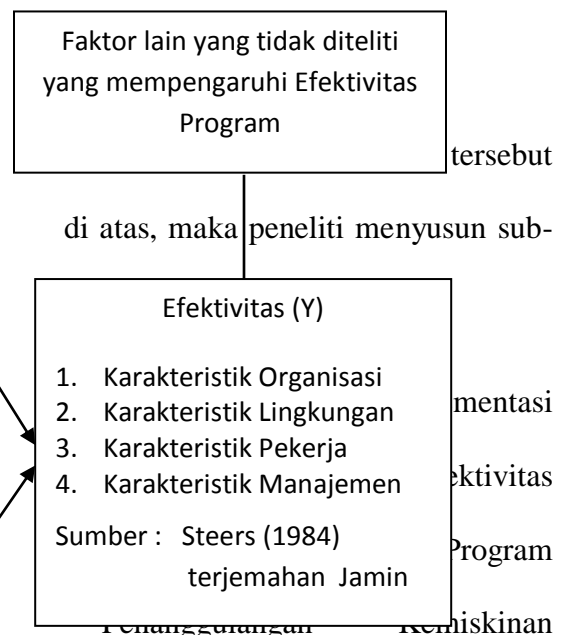
## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : ” Implementasi Kebijakan dan Koordinasi merupakan determinan dalam mencapai efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten



Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat diukur melalui dimensi implementasi kebijakan.

2. Besarnya Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat diukur melalui dimensi implementasi kebijakan.

3. Besarnya Pengaruh Implementasi dan Koordinasi secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Bandung Barat diukur melalui dimensi Implementasi kebijakan dan dimensi-dimensi koordinasi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Namun demikian, untuk lebih memahami fenomena yang diamati, maka dilengkapi dengan analisis kualitatif berupa analisis jalur. Teknik ini dipergunakan untuk menganalisis secara deskriptif yang didukung oleh teori. Untuk itu dipergunakan pedoman tabulasi data dari Panuju (1995 : 44-47) sebagai berikut :

”Nilai Indeks Minimum yaitu skor minimum dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden.

Nilai Indeks Maksimum yaitu skor maksimum dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden.

Range yaitu selisih antara Nilai Indeks

Maksimum dikurangi Nilai Indeks Minimum.

Jenjang Range yaitu range dibagi jenjang yang diinginkan.

Tingkatan yang diberikan adalah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.”

Tingkat (katagori) yang diberikan adalah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

#### 4. PEMBAHASAN

##### Pembahasan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) diarahkan pada tiga bidang pengembangan, atau upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat pada tiga bidang utama, yaitu bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang sosial. Upaya ini pada gilirannya menuju pada keberdayaan

masyarakat dalam kemandirian berusaha untuk segera keluar dari masalah kompleksitas kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, pada umumnya Implementasi Kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, artinya implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada umumnya telah berjalan sesuai dengan dimensi-dimensi implementasi kebijakan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil tanggapan responden pada variabel Implementasi Kebijakan dengan memperoleh skor total 1883 atau 85,59% dari skor ideal 2200. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi tersebut, diantaranya adalah



mengenai implementasi kebijakan belum berdasarkan pada asal masalah dan jumlah masalah yang ada dalam penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, selain itu juga dalam langkah-langkah penanganan program penanggulangan kemiskinan perkotaan masih belum maksimal mampu mencapai efektivitas program.

## 2. Pembahasan Koordinasi

Program apapun yang digulirkan oleh pemerintah pusat termasuk kebijakan P2KP, tidak saja membutuhkan dukungan dari masyarakat sasaran kebijakan P2KP, tapi yang lebih penting adalah bagaimana tingkat responsivitas pemerintah dan aparaturnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan P2KP. Dalam perspektif ini tingkat responsivitas

pemerintah dapat dilihat dari daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, kemampuan aparatur pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh tahapan P2KP.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dalam implementasi kebijakan Program P2KP dengan SKPD dan fungsi terkait lainnya dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan harmonis walaupun belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan responden terhadap variabel koordinasi yang memperoleh skor

1198 atau 85,57% dari skor ideal dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan dalam implementasi P2KP telah berjalan dengan semestinya, koordinasi yang dilakukan telah memperhatikan jiaraki manjerial, aturan dan prosedur serta rencana dan penetapan tujuan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang penulis lakukan Kepala Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan perkotaan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dengan efektif, dapat dikatakan efektif karena seringkali melakukan rapat-rapat interen untuk menyamakan persepsi

juga untuk mengevaluasi hal-hal yang salah atau tidak sesuai dengan program.

#### 1. Pembahasan Efektivitas

Program Penanggulangan Kemiskinan di daerah Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di daerah perkotaan. P2KP diyakini merupakan pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (edukasi) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Dengan Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) Prinsip-

prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden, efektivitas pelaksanaan program dalam P2KP memperoleh skor sebesar 2889 atau sebesar 84,97% dari skor ideal 3400. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan telah dilaksanakan secara efektif, artinya bahwa program P2KP tersebut telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerjaan dan kebijakan dan praktek manajemen.

Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat pada umumnya telah berjalan secara efektif, walaupun masih belum maksimal, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan, penciptaan lingkungan prestasi dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan program P2KP.

#### Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Sebagai Determinan Dalam Mencapai Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat ditemukan beberapa

fakta menyangkut masalah tersebut di atas, diantaranya:

1. Implementasi kebijakan belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik masalah terutama dalam hal keanekaragaman masalah dan langkah-langkah penanganan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan di Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat belum secara optimal memperhatikan keanekaragaman permasalahan yang ada dan langkah-langkah dalam penanganan program P2KP, belum mampu menyelesaikan secara tuntas permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat di daerah Perkotaan.
2. Koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana program belum

dilaksanakan berdasarkan pada kejelasan perintah dan aliran informasi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana program pengentasan kemiskinan perkotaan di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat belum secara optimal memanfaatkan aliran informasi sesuai dengan struktur organisasi yang ada baik dalam struktur program maupun struktur organisasi Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Para pelaksana program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) kurang memahami perintah secara utuh termasuk tujuan dan sasaran perogram P2KP dari atasannya dalam rangka

implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan tersebut.

3. Efektivitas Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, secara umum telah terlaksana secara efektif, namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih belum maksimalnya peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, penciptaan lingkungan prestasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan program.

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang

Kabupaten Bandung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil tabel *coeffisien* yang menyatakan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari tingkat *margin eror* yang ditentukan dan memiliki kontribusi terhadap Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat yang dilihat dari hasil uji t hitung.

2. Koordinasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil tabel *coeffisien* yang menyatakan bahwa

tingkat signifikansinya lebih kecil dari tingkat *margin eror* yang ditentukan dan memiliki kontribusi terhadap Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat yang dilihat dari hasil uji t hitung.

3. Implementasi Kebijakan dan Koordinasi secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji anova *dan Tabel Model Summary*. dan selain variabel Implementasi Kebijakan dan

Koordinasi diketahui ada variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

#### B. Saran-Saran

1. Untuk menjaga keterjaminan dan keberlanjutan program P2KP di Kabupaten Bandung Barat, maka pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memberdayakan organisasi masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat di tingkat Desa dibutuhkan aktivitas yang partisipatif dalam menyusun dan merencanakan bentuk-bentuk kegiatan program

P2KP di Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya berkelanjutan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

2. Melihat dampak yang signifikan implementasi kebijakan P2KP di Kabupaten Bandung Barat terhadap penurunan angka kemiskinan, maka responsivitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran melalui APBD pada setiap tahun secara berkelanjutan.
3. Penerimaan masyarakat terhadap program atau kebijakan P2KP ditumbuhkan dalam realitas kemasyarakatan agar warga masyarakat akan lebih mengetahui, memahami dan melibatkan diri secara langsung dalam setiap kebijakan

pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tidak terkecuali terhadap keberlanjutan implementasi kebijakan P2KP di Kabupaten Bandung Barat.

4. Aparatur pemerintah sebagai aktor implementasi kebijakan P2KP, dalam mengefektifkan karakteristik masalah, struktur manajemen dan faktor-faktor di luar peraturan yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar lebih fleksibel dalam penerapannya dan tidak birokratis dalam implementasi kebijakan P2KP tersebut.
5. Kebijakan P2KP perlu dilanjutkan dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan dan menstranformasikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang

hidup dan berkembang sebagai bingkai dan spirit gotong royog dalam membangun daerah.

## Daftar Pustaka

AWANG, San Afri,

2003 Politik Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta : Center For Critical Social Studies (CCSS) & Kreasi Wacana;

DUNN, William N

2003 Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gajah Mada University.

DWIJOWIJOTO, Riant Nugroho

2004 Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

EDISON, Emron

2016 Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, CV. Alfabeta

HANDOKO, Hani T,

2003 Manajemen. Yogyakarta : BPFE

ISLAMY, Irfan,

2002 Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara : Jakarta, Rumi Aksara

WIDODO, Joko,

2010 Peningkatan Kinerja SDM melalui Pengalaman dan Pengetahuan Prosedur, Journal of Human Capital To Promote Human Capital Development. Jakarta : Bakrie School of Management.

SUGANDHA, Dann,

1991 Koordinasi sebagai Pemersatu Gerak dala Proses Administrasi, Bandung : Ilham Jaya,